

Sosialisasi Permodalan Dan Kredit Usaha Umkm Di Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung

* Meirani Rahayu Rukmanda¹ Bambang Heryanto² Dede Arisda Maolana Hakim³ Fitriyani⁴

** STAI Miftahul Huda Subang¹⁻³ IAIN Syekh Nurjati⁴

*** meiranirahayu@gmail.com¹ althafzio2015@gmail.com² dedearisda9@gmail.com³
fitriyani.cassao99@gmail.com⁴

Abstrak

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun tujuan dari sosialisasi ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang mengalami kesulitan permodalan dalam menjalankan usaha, bahwa terdapat lembaga keuangan, yakni bank, yang bersedia membantu mengatasi masalah modal melalui pemberian pinjaman kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan dan hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendala ini muncul karena minimnya informasi yang diterima oleh mereka, sehingga terbentuk anggapan bahwa akses ke KUR sulit karena prosedurnya yang kompleks.

Keywords : UMKM, Kredit Usaha

Abstract

The Kredit Usaha Rakyat (KUR) program is a government initiative to increase access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). The purpose of this socialization is to convey information to the community and business actors, especially those experiencing capital difficulties in running a business, that there are financial institutions, namely banks, that are willing to help overcome capital problems through the provision of credit loans, such as the People's Business Credit (KUR). The research method used is using a qualitative method with field research and the results of this study show that most UMKM actors do not have knowledge about People's Business Credit (KUR). This obstacle arises because of the lack of information received by them, so that an assumption is formed that access to KUR is difficult because of its complex procedures.

Keywords: *UMKM, Business Credit*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari berbagai data yang menunjukkan mengenai eksistensi UMKM yang cukup dominan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Banyak Usaha Mikro, Kecil dan menengah mampu bertahan di tengah menghadapi krisis dan kondisi perekonomian yang tidak stabil semakin menunjukkan sangat pentingnya sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan demikian, untuk meningkatkan PDB, maka sangat penting untuk meningkatkan sektor konsumsi yaitu dengan memperkuat UMKM.(Sriwati, 2022)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut UU No.10 Tahun 1998 (revisi UU No.14 Tahun 1992), bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang kegiatannya melibatkan penerimaan dan penyaluran dana dari serta untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan luas. Peningkatan usaha masyarakat, yang membutuhkan bantuan biaya dan penyerapan tenaga kerja, masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, membuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menjadi program yang diminati oleh para pelaku usaha. Dana KUR Mikro diterima dari bank, seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjadi saluran sesuai dengan proses dan tahapannya. Penyaluran KUR adalah kredit atau pembiayaan bagi UMKM dengan bentuk modal kerja dan investasi, didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.(Marlisa, 2020)

Kunci esensial bagi pengusaha dalam membangun dan mengembangkan usahanya adalah modal. Tanpa modal, menjalankan usaha menjadi sulit bahkan tidak mungkin. Banyak pengusaha yang menghadapi kesulitan dan bahkan kegagalan karena kekurangan modal. Oleh karena itu, pemanfaatan kredit usaha untuk UMKM menjadi solusi bagi mereka yang mengalami kekurangan modal. Faktor krusial dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah sosialisasi. Sosialisasi, sebagai bagian dari proses rekayasa sosial, memiliki potensi memberikan dampak positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), diharapkan dapat mengatasi kendala terkait keterbatasan akses permodalan.(Sriwati, 2022)

Pada November 2007, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019, KUR merupakan kredit atau pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi bagi debitur individu, badan usaha, atau Kelompok Usaha yang dinilai produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang cukup. Implementasi KUR bertujuan untuk: Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan Mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencakup individu atau perseorangan, baik secara mandiri maupun dalam bentuk Kelompok Usaha atau badan usaha, yang terlibat dalam kegiatan usaha produktif. Kelompok penerima KUR melibatkan: Usaha mikro, kecil, dan menengah, Usaha mikro, kecil, dan menengah yang berasal dari keluarga karyawan/karyawati dengan penghasilan tetap atau yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, Usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain, Usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, serta/atau pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), atau kelompok usaha lainnya, Usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dan calon peserta magang di luar negeri.(Fitrio, 2022)

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai KUR. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik ini, para pelaku usaha dapat menjadi lebih maju dan sejahtera dalam menjalankan usahanya. Indarto Budiwitono, Kepala OJK Regional II Jawa Barat, menjelaskan bahwa OJK memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah melalui sosialisasi KUR. OJK juga memiliki target untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 90 persen dan literasi keuangan sebesar 70 persen pada tahun 2025.(Ombudsman, 2023) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung juga memberikan pendampingan kepada 1.000 pelaku usaha setiap tahunnya melalui Sistem Informasi Kewirausahaan yang Terintegrasi (Sirkuit) untuk meningkatkan omzet mereka. Dengan adanya sosialisasi KUR ini, diharapkan pelaku UMKM di Kota Bandung dapat lebih mudah memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan melakukan sosialisasi kredit usaha pada UMKM di Babakan Surabaya

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi terhadap sejumlah UMKM, melakukan wawancara dengan informan terkait, dan mengumpulkan data melalui dokumentasi.

PEMBAHASAN

Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang mengalami kesulitan permodalan dalam menjalankan usaha, bahwa terdapat lembaga keuangan, yakni bank, yang bersedia membantu mengatasi masalah modal melalui pemberian pinjaman kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam kegiatan sosialisasi, pemateri mengkomunikasikan materi mengenai KUR secara langsung kepada masyarakat dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dana KUR.



Gambar 1. Syarat calon penerima KUR

UMKM dapat mengajukan kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan melalui prosedur yang sangat ketat. Hal itu dilakukan karena perbankan menganut prinsip kehati-hatian. Kredit melalui perbankan dapat digunakan untuk investasi, modal kerja bahkan untuk keperluan konsumtif. Perbankan memberikan kredit kepada debitur baik dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah sampai pelaku usaha besar. Walaupun sebenarnya perbankan memiliki kewajiban memberikan kredit bagi UMKM paling rendah 20% dari total kredit yang disalurkan.

Kredit melalui perbankan harus melalui seleksi dari analisis kredit dengan mempertimbangkan kelayakan calon debitur dengan melihat unsur-unsur seperti character, capacity, collateral, capital, dan

condition Selain kredit umum yang diberikan perbankan, pemerintah juga memiliki program pembiayaan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR).

KUR disalurkan melalui lembaga perbankan dan non perbankan. Terdapat 46 lembaga keuangan bank dan bukan bank yang menyalurkan KUR dengan rincian 40 lembaga perbankan, tiga lembaga leasing, dan tiga koperasi. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan permodalan bagi UMKM agar mampu berkembang. Sumber dana KUR berasal dari perbankan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja UMKM baik perorangan maupun kelompok. Pembiayaan juga dapat dilakukan melalui platform perusahaan fintech. Platform fintech yang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi UMKM adalah P2P lending dan crowdfunding.

Pembiayaan melalui P2P lending tidak serumit pengajuan di perbankan. Calon debitur cukup mengisi aplikasi di platform fintech yang dituju. Hanya dalam hitungan jam bahkan menit platform fintech akan menginformasikan keputusan apakah ajukan kita disetujui atau ditolak. Proses analisis kredit yang dilakukan oleh perusahaan P2P lending cukup menggunakan big data. Namun, ada hal yang harus diperhatikan apabila mengajukan pembiayaan melalui P2P lending. Periksa dulu apakah perusahaan tersebut legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Pemberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, penjelasan tidak hanya berfokus pada teori, melainkan lebih fokus pada pembahasan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM. Dalam bidang usaha kecil, ruang pelatihan dibagi untuk pelaku usaha yang terlibat dalam produksi barang, serta yang bergerak dalam perdagangan atau penjualan. Pemateri juga menginformasikan regulasi pemerintah terkait pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana skema subsidi bunga diterapkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dalam skema ini, suku bunga KUR diturunkan hingga mencapai titik terendah, yaitu 6% efektif per tahun. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga tambahan sebesar 3%, sehingga suku bunga KUR hanya 3%.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi kredit usaha untuk UMKM



Gambar 3. Foto bersama peserta sosialisasi

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang masih memerlukan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan informasi yang terhimpun, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendala ini muncul karena minimnya informasi yang diterima oleh mereka, sehingga terbentuk anggapan bahwa akses ke KUR sulit karena prosedurnya yang kompleks. Dari seluruh peserta yang ikut dalam sosialisasi, hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman tentang KUR dan hanya sedikit yang berhasil mengaksesnya. Hal ini dapat dimaklumi karena selain latar belakang pendidikan yang rendah, mereka jarang terlibat dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, terutama pelaku usaha, dapat memperoleh informasi lengkap tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, untuk membantu mengatasi kendala permodalan dalam pengembangan usaha mereka. Para pelaku usaha juga dapat memahami persyaratan dan cara mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KESIMPULAN

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang mengalami kesulitan permodalan dalam menjalankan usaha, bahwa terdapat lembaga keuangan, yakni bank, yang bersedia membantu mengatasi masalah modal melalui pemberian pinjaman kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendala ini muncul karena minimnya informasi yang diterima oleh mereka, sehingga terbentuk anggapan bahwa akses ke KUR sulit karena prosedurnya yang kompleks.

REFERENSI

- Fitrio, T. D. P. (2022). Sosialisasi Pendanaan Usaha Melalui Kredit Usaha Rakyat. *Value : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 15–23.
- Marlisa, E. R. (2020). Sosialisasi Fasilitas Kredit Usaha Mikro Dan Kredit Usaha Rakyat Di Arso Xiv Kabupaten Keerom. *The Community Engagement Journal : The Commen*, 3(1), 34–47.

<https://doi.org/10.52062/thecommen.v3i1.143>

Ombudsman. (2023). *Pemkot Bandung, OJK dan Ombudsman RI Sosialisasikan KUR Untuk Permodalan UMKM di Pasar Kosambi*. Ombudsman Republik Indonesia.

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pemkot-bandung-ojk-dan-ombudsman-ri-sosialisasikan-kur-untuk-permodalan-umkm-di-pasar-kosambi>

Sriwati, N. K. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir. *Mosintuwu :Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–27. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/mosintuwu/article/view/465>